

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dengan diterapkannya Otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem Pemerintah Daerah, yang kini telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam menyelenggarakan semua urusan Pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas tersebut, Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Dan kewajiban tersebut bisa terpenuhi apabila Pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan pada suatu daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah

daerah dalam membiayai Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan daerah dan Pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat.

Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja di bidang keuangan.

Berdasarkan Data yang diperoleh dan diteliti oleh Peneliti dari BPKA Kota Bandung, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, yaitu diantaranya adalah berkaitan dengan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan daerah. Dimana, semenjak Periode Tahun Anggaran 2013, Kualitas Penyajian Laporan Keuangan daerah Pemerintah kota Bandung tidak pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel 1. 1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
Tahun Anggran 2013 – 2017**

No	Tahun LKPD	Opini BPK
1.	Tahun Anggaran 2013	Wajar Dengan Pengecualian
2.	Tahun Anggaran 2014	Wajar Dengan Pengecualian
3.	Tahun Anggaran 2015	Wajar Dengan Pengecualian
4.	Tahun Anggaran 2016	Wajar Dengan Pengecualian
5.	Tahun Anggaran 2017	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber : Buku Profil (Diolah Peneliti), 2017

Terkait Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah, Mahmudi (2016: 40-41) menyatakan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP memiliki arti bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah daerah telah disajikan secara wajar untuk semua pos (akun) yang dilaporkan, tidak terdapat salah saji yang material dan tidak ada penyimpangan dari akuntansi atau dari prinsip akuntansi. Sedangkan Opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP memiliki arti bahwa sebagian besar pos dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan terbebas dari salah saji material dan sesuai standar atau prinsip akuntansi, namun untuk pos tertentu disajikan dengan tidak wajar”.

Agar laporan keuangan daerah lebih bermakna dan bermanfaat untuk bahan pertimbangan pembuatan keputusan serta untuk pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan daerah, maka laporan keuangan daerah tersebut, perlu dianalisis lebih lanjut. Karena hasil Opini BPK terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah kota Bandung tidak sepenuhnya mencerminkan baik atau tidaknya kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Bandung, maka ada aspek lain yang perlu dilihat dan dinilai dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Bandung yaitu dengan menggunakan Teknik analisis Rasio Keuangan

Dalam laporan keuangan Pemerintah daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menduduki prioritas yang lebih penting dan LRA ini merupakan jenis Laporan Keuangan Daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat Laporan Neraca dan Laporan Arus kas. Anggaran dalam Pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan Pemerintahan. Anggaran memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh Karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling utama. Berdasarkan LRA

tersebut, peneliti dapat menganalisa Laporan Keuangan daerah dengan menggunakan Teknik analisis Rasio keuangan.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan daerah dan Pelayanan kepada masyarakat wajib melaporkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat, sebagai dasar penilaian Kinerja Keuangannya. Dan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di suatu daerah. Halim (2007: 230)

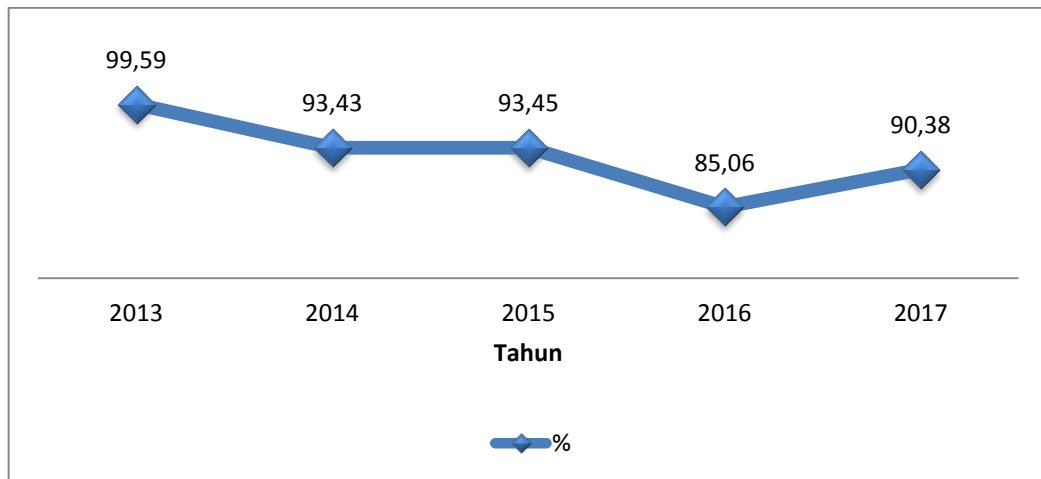
Kemudian peneliti menemukan permasalahan lain yaitu berkaitan dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana, Realisasi Pendapatan daerah Pemerintah Kota Bandung Periode Tahun Anggaran 2013-2017, belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan potensi rill daerah Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan daerah Kota Bandung
Periode Tahun Anggaran 2013-2017**

No	Tahun	Taget	Realisasi	%
		Dalam Ribuan	Dalam Ribuan	
1.	2013	Rp 4.349.877.954	Rp 4.332.088.946	99,59
2.	2014	Rp 5.302.471.398	Rp 4.953.940.629	93,43
3.	2015	Rp 5.455.361.616	Rp 5.098.071.916	93,45
4.	2016	Rp 6.684.129.617	Rp 5.685.213.859	85,06
5.	2017	Rp 6.345.545.693	Rp 5.735.006.649	90,38

Sumber : Data Sekunder (Diolah Peneliti), 2017

Grafik 1. 1 Presentase Capaian Target Pendapatan Kota Bandung



Sumber : Data Sekunder (Diolah Peneliti), 2017

Berkaitan dengan Pendapatan daerah, Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan demikian, realisasi pendapatan daerah tersebut, harus mencapai jumlah anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya, Sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga Pemerintah yang berada di Kota Bandung.

Berdasarkan Tabel perhitungan di atas, dapat kita diketahui bahwa Realisasi Pendapatan daerah pada APBD Pemerintah Kota Bandung pada periode Tahun Anggaran 2013-2017, belum mencapai target yang telah di tetapkan sebelumnya. Yaitu Pada Periode Tahun Anggaran 2013, terealisasi sebesar 99,59%. Kemudian pada Periode Tahun Anggaran 2014, hanya terealisasi sebesar 93,43% Lalu Pada periode tahun anggaran 2015, terealisasi sebesar 93,45%. Dan Pada Periode Tahun Anggaran 2016, terealisasi sebesar 85,06 %. Serta pada Periode Tahun Anggaran 2017, terealisasi sebesar 90,38% dari besaran target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Meskipun demikian, secara nominal baik Realisasi

maupun anggaran Pendapatan daerah pada APBD Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013-2017, setiap tahunnya mengalami Peningkatan.

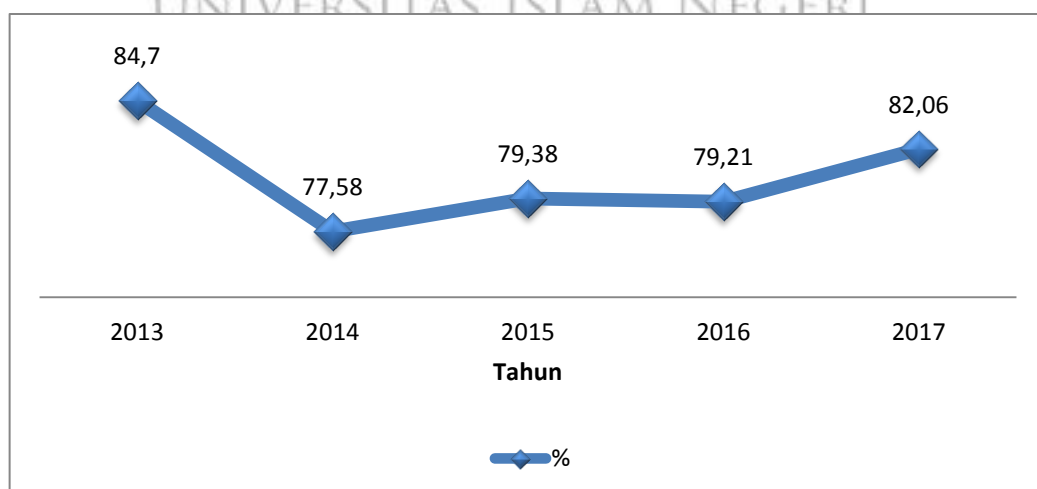
Kemudian, Realisasi belanja daerah pada APBD Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013- 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja daerah Kota Bandung
Periode Tahun Anggaran 2013 – 2017**

No	Tahun	Taget	Realisasi	%
		Dalam Ribuan	Dalam Ribuan	
1.	2013	Rp 4.755.244.946	Rp 4.027.469.180	84,70
2.	2014	Rp 5.717.545.328	Rp 4.435.589.826	77,58
3.	2015	Rp 6.553.368.797	Rp 5.201.938.207	79,38
4.	2016	Rp 7.360.848.469	Rp 5.830.413.719	79,21
5.	2017	Rp 6.752.914.685	Rp 5.541.718.107	82,06

Sumber : Data Sekunder (Diolah Peneliti), 2017

Grafik 1. 2 Presentase Capaian Target Belanja Daerah Kota Bandung



Sumber : Data Sekunder (Diolah Peneliti), 2017

Berkaitan dengan Belanja daerah, jumlah Belanja daerah yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja. Jadi, realisasi Belanja daerah tidak melebihi dari jumlah anggaran Belanja daerah yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Persentase Capaian Target Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013-2017, adalah berada di bawah nilai 90%. Dimana mengidentifikasi bahwa penyerapan Anggaran Belanja daerah Pemerintah kota Bandung tergolong rendah dan selisih antara Realisasi dengan Anggaran Belanja daerah terbilang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan adanya Efisiensi Anggaran, atau memungkinkan telah terjadinya kelemahan dalam perencanaan Anggaran sehingga estimasi belanja daerahnya kurang tepat, atau tidak terserapnya Anggaran belanja tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya Program yang tidak dilaksanakan oleh Eksekutif padahal sudah diamanatkan di dalam Anggaran.

Berdasarkan Tabel Perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa Pada Periode Tahun Anggaran 2013, terealisasi sebesar 84,70%. Kemudian pada Periode Tahun Anggaran 2014, terealisasi sebesar 77,58%. Lalu pada Periode Tahun Anggaran 2015, terealisasi sebesar 79,38% Dan Pada Periode Tahun Anggaran 2016, hanya terealisasi sebesar 79,21%. Serta, pada Periode Tahun Anggaran 2017, terealisasi sebesar 82,06%, dari besaran anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Meskipun demikian, secara nominal baik Realisasi maupun anggaran Belanja daerah pada APBD Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013-2017, selalu mengalami Peningkatan kecuali Periode Tahun Anggaran 2017.

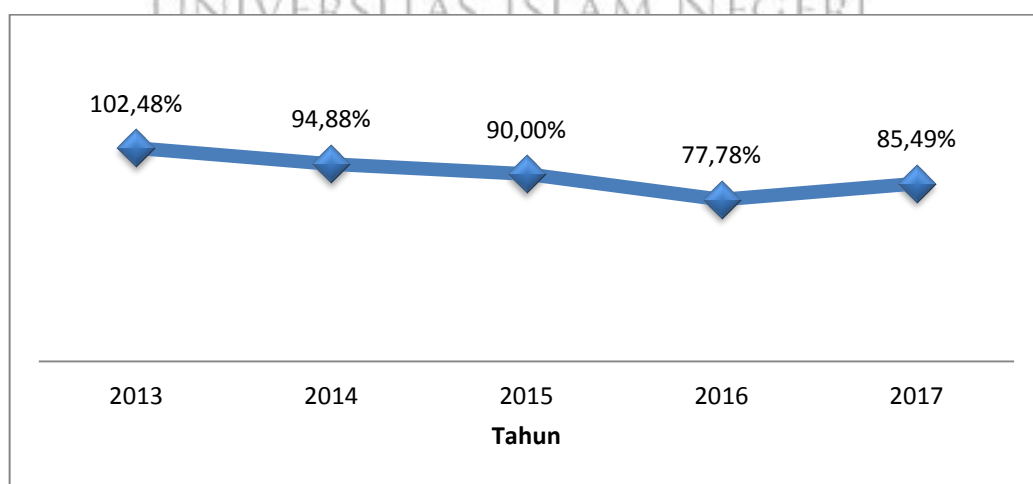
Lalu Permasalahan lainnya, adalah berkaitan dengan Realisasi PAD. Dimana Realisasi PAD Pemerintah kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013-2017, tidak mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kecuali pada Periode Tahun Anggaran 2013. Hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini;

**Tabel 1. 4 Anggaran dan Realisasi PAD Kota Bandung
Periode Tahun Anggaran 2013 - 2017**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
2013	Rp1.407.759.106.133	Rp 1.442.775.238.323	102,48%	Tercapai
2014	Rp1.808.509.055.075	Rp 1.716.057.298.378	94,88%	Tidak tercapai
2015	Rp 2.066.246.830.526	Rp1.859.694.643.505	90,00%	Tidak tercapai
2016	Rp 2.767.404.903.364	Rp2.152.755.704.962	77,78%	Tidak tercapai
2017	Rp 3.015.836.590.302	Rp2.578.457.420.885	85,49%	Tidak tercapai

Sumber : Data Sekunder (Diolah Peneliti), 2017

Grafik 1. 3 Presentase Capaian Target PAD Pemerintah Kota Bandung



Sumber : Data Sekunder (Diolah Peneliti), 2017

Berdasarkan Tabel perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa baik Anggaran PAD maupun Realisasi PAD Pemerintah Kota Bandung pada periode Tahun Anggaran 2013-2017, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun, untuk Realisasi PAD Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013-2017, belum mencapai jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kecuali pada Periode Tahun Anggaran 2013. Yaitu pada Periode Tahun Anggaran 2014, terealisasi sebesar 94,88%. Kemudian pada Periode Tahun Anggaran 2015, terealisasi sebesar 90,00%. Lalu pada Periode Tahun Anggaran 2016, terealisasi sebesar 77,78%. Dan pada Periode Tahun Anggaran 2017, terealisasi sebesar 85,49% dari jumlah total anggaran PAD.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan suatu penelitian mengenai pengukuran kinerja Keuangan Pemerintah daerah dalam mengelola Keuangan Daerahnya. Dimana Pengukuran Kinerja Keuangan daerah ini, dapat digunakan untuk mengetahui Apakah Kinerja Pemerintah daerah dalam mengelola Keuangan Daerahnya dapat dikatakan baik atau tidak. Selain itu, Pengukuran kinerja Keuangan daerah bermanfaat untuk mengetahui tingkat prestasi yang telah dicapai oleh suatu daerah setelah daerah tersebut melakukan target pencapaian.

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Bandung adalah dengan melakukan Analisis Rasio keuangan terhadap APBD Kota Bandung yang telah ditetapkan di Daerah Kota Bandung, maka Peneliti menganggap Penting Penelitian dengan judul Skripsi sebagai berikut **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 - 2017 “**

B. Fokus Masalah

Fokus Masalah dalam Penelitian ini adalah berkenaan dengan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung Periode Tahun Anggaran 2013-2017, berdasarkan Rasio Keuangan daerah. Yaitu Rasio Kemandirian daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, antara lain:

1. Bagaimanakah Tingkat Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Bagaimanakah Tingkat Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimanakah Tingkat Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan daerah?
4. Bagaimanakah Tingkat Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja?
5. Bagaimanakah Tingkat Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Rasio Pertumbuhan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui, sebagai berikut :

1. Mengetahui Tingkat Kinerja keuangan daerah Pemerintah daerah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;
2. Mengetahui Tingkat Kinerja keuangan daerah Pemerintah daerah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah;
3. Mengetahui Tingkat Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah daerah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah;
4. Mengetahui Tingkat Kinerja keuangan Daerah Pemerintah daerah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja;
5. Mengetahui Tingkat Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Rasio Pertumbuhan;

E. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya Penelitian ini, diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat, yaitu antara lain;

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Secara Teoretis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengukur dan Menganalisis Tingkat Kinerja Keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola Keuangan Daerahnya, berdasarkan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi keuangan daerah, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menentukan kebijakan, dan strategi untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja keuangan daerah.
 - b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan Ilmu Pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana cara mengukur dan menganalisis tingkat kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung dengan menggunakan alat analisis yaitu berupa Analisis Rasio keuangan daerah.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai informasi tambahan yang berguna, serta sebagai bahan acuan ataupun referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, khususnya di bidang yang sama.
 - d. Bagi Institusi pendidikan, dapat digunakan sebagai tambahan bahan referensi kepustakaan dalam rangka perluasan penelitian yang sejenis.

F. Kerangka Pemikiran.

Keberhasilan Otonomi pada suatu daerah, tidaklah terlepas dari kinerja Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Dengan demikian,

Kinerja Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah harus di ukur. Pengukuran Kinerja Keuangan daerah adalah merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan Pemerintah daerah di bidang keuangan dan dalam kurun waktu tertentu. Dimana, Pengukuran kinerja Keuangan Pemerintah daerah ini, bermanfaat untuk mengetahui tingkat prestasi yang telah dicapai oleh suatu daerah setelah melakukan target pencapaian.

Salah satu Alat untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di suatu daerah. Dimana Hasil dari analisis Rasio keuangan ini, dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam Menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerahnya, Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, dan Mengukur kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta dapat juga digunakan untuk Melihat tingkat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Halim (2007: 230)

Beberapa rasio Keuangan daerah yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja adalah, yaitu sebagai berikut; Halim (2007: 232-236)

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan Retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Kemandirian keuangan daerah di tunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Rasio Kemandirian Keuangan daerah ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan Kemampuan Pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan Potensi rill daerah. kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio Efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Efektivitas Pendapatan dapat ditunjukkan oleh perbandingan antara target yang ingin dicapai dengan realisasi yang dihasilkan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Keuangan daerah

Rasio Efisiensi Keuangan daerah adalah Rasio rasio yang menggambarkan perbandingan perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan Realisasi Pendapatan yang diterima. Kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan Pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil nilai Rasio Efisiensi Keuangan daerah berarti semakin baik. Rasio Efisiensi Keuangan daerah ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi Presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan Prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut;

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Rutin atau Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan atau Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari Periode ke Periode Berikutnya. Diketuainya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi Potensi Potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio Pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut;

a) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } Th_t - Th_{t-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } Th_{t-1}} \times 100\%$$

b) Rasio Pertumbuhan Pendapatan daerah

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } Th_t - Th_{t-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } Th_{t-1}} \times 100\%$$

c) Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi } Th_t - Th_{t-1}}{\text{Belanja Operasi } Th_{t-1}} \times 100\%$$

d) Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal } Th_t - Th_{t-1}}{\text{Belanja Modal } Th_{t-1}} \times 100\%$$

Untuk lebih memperjelas Konsep dan Arah Penelitian, maka peneliti membuatsuat Kerangka Pemikiran, yaitu sebagai berikut;

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Berdasarkan atas uraian Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah serta Kerangka Pemikiran di atas tersebut, Peneliti merumuskan Proposisi sebagai berikut, yaitu: mengukur dan menganalisis Tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kota Bandung pada Periode Tahun Anggaran 2013 sampai Periode Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Rasio-rasio Keuangan daerah. Yaitu Rasio Kemandirian daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan daerah, Rasio Aktivitas Belanja dan Rasio Pertumbuhan terhadap APBD Pemerintah Kota Bandung. Apabila semua Rasio-rasio keuangan daerah diatas, menunjukkan hasil atau perhitungan yang sesuai, maka Kinerja Pemerintah daerah Kota Bandung dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dikatakan baik.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG